

## Analisis Pemanfaatan E-Government di Kantor Lurah Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang

### Analysis of E-Government Utilization in Guntung Lurah Office, North Bontang Sub-District, Bontang City

Suci Azizah Febriyani<sup>1</sup>, Muhammad Hairul Saleh<sup>2</sup>, Jauchar Berlian<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Pemerintahan Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

#### ARTICLE INFORMATION

Vol. 10, No. 04  
Page: 130-138  
Published: 2022

#### KEYWORDS

Utilization, E-government, Employees

#### CORRESPONDENCE

E-mail: [suciazizahf@gmail.com](mailto:suciazizahf@gmail.com)

#### A B S T R A C T

This study aims to analyze and describe the forms of e-government utilization at the Guntung Lurah Office, analyze and describe the use of e-government in facilitating the work of employees at the Guntung Lurah Office and identify the driving factors and inhibiting factors for the use of e-government at the Guntung Lurah Office. The type of research used is descriptive qualitative. The data collection technique used was library research and field research using observation, interviews and documents. In this study using data analysis developed by Miles and Huberman. The results of the study show that the use of e-government in the Guntung Lurah Office has various forms of use in various fields, namely there are seven forms of e-government, the use of e-government in facilitating the work of employees seen from indicators of efficiency, effectiveness and transparency has been fulfilled. For the driving factors seen from the successful elements of e-government development, namely support/support, capacity/ability, value/benefits, and local culture/local culture to produce supporting elements so that e-government can be implemented. However, in the implementation, there are still obstacles that hinder the use of e-government, such as the internet network which plays an important role, in fact it is still experiencing problems, the lack of socialization carried out to the public in the field of services and application development has not been carried out optimally.

#### INTRODUCTION

Melalui Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan E-government, Kota Bontang merupakan salah satu kota yang menerapkan e-government atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada instansi pemerintahannya. Pemanfaatan e-government sebagai salah satu upaya peningkatan dan pengoptimalan teknologi komunikasi dan informasi dalam bidang pemerintahan. E-government merupakan aplikasi teknologi informasi yang dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-government ini menjadi langkah serius bahwa pemerintah Negara Indonesia optimis dan serius dalam melakukan serta mengembangkan penggunaan, pemanfaatan serta pengoptimalan teknologi komunikasi dan informasi dalam praktek-praktek pemerintahannya dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan Guntung merupakan salah satu dari 15 kelurahan yang terletak di Kota Bontang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government, Kantor

Lurah Guntung mengimplementasikan pemanfaatan e-government dengan memiliki situs web yang beralamat <http://kelguntung.bontangkota.go.id/> ini merupakan salah satu contoh penerapan e-government tingkat pertama ialah memanfaatkan website untuk mempublikasikan informasi-informasi mengenai kelurahan. Dalam penggunaan e-government yang dilakukan di Kantor Lurah Guntung ini tidak terlepas dengan peranan pegawai untuk melakukan pemanfaatan e-government sehingga dapat menghasilkan berbagai inovasi serta dapat memberikan manfaat dalam membantu pekerjaan pegawai manfaat tersebut dapat dilihat dari pegawai dapat melaksanakan tugas dengan efisien, efektif dan transparansi.

Dalam hal ini akan membahas tentang bentuk pemanfaatan e-government, pemanfaatan e-government dalam memudahkan pekerjaan dan hasil dari pemanfaatan e-government, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam melakukan pemanfaatan e-government, dengan judul Analisis Pemanfaatan E-government di Kantor Lurah Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang

## THEORETICAL FRAMEWORK

### Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan aktivitas atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu hal memiliki manfaat, dengan tambahan imbuhan pe- dan -an menunjukkan suatu kegiatan atau proses memanfaatkan (Poerwadarminto, 2002: 125).

Menurut Prof J.S. Badudu dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengatakan bahwa, pemanfaatan adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.

### E-government

Menurut Wijaya (2015:14) Kombinasi antara buah pemikiran New Public Management (NPM) dengan pemanfaatan teknologi informasi yang nampak di dalam

fenomena administrasi melalui internet ini telah melahirkan konsep aplikasi pemerintahan digital atau yang lebih populer yang disebut dengan *Electronic Governmet*.

*E-government* menurut Eddy Satriya (dalam Helim, 2009:4) merupakan usaha pemanfaatan telematika di pemerintahan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah, penyediaan informasi kepada masyarakat secara menyeluruh, untuk menyediakan jenis-jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dengan baik dan sebagai upaya untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bertanggung jawab dan transparan.

Konsep *e-government* atau tipe *e-government* Yildiz (dalam Damanik dan Purwaningsih, 2017:154-155) yang dibagi menjadi 3 kategori, ialah:

#### 1. G2C (*Government to Citizen*)

Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang mana masyarakat dapat memperoleh akses informasi dalam mendapatkan pelayanan publik untuk kebutuhan masyarakat.

#### 2. G2B (*Government to Business*)

Menghubungkan antara pemerintah dengan pelaku usaha di dalam maupun luar negeri dengan menyediakan informasi untuk memudahkan dalam pengembangan bisnis para pelaku usaha.

#### 3. G2G (*Government to Government*)

Merupakan relasi yang terdapat pada instansi pemerintahan yang bertujuan untuk saling memperoleh informasi yang dibutuhkan.

### Tahapan Pengembangan *E-government*

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government* membagi pengembangan *e-government* berdasarkan

transaksi informasi dan pelayanan menjadi 4 tingkatan, yakni:

1. Tingkat 1 (Persiapan)
  - a. Pembuatan situs/ web informasi di setiap instansi pemerintahan,
  - b. Penyiapan sumber daya manusia di setiap instansi pemerintahan,
  - c. Menyediakan sarana akses informasi yang mudah,
  - d. Melakukan sosialisasi situs informasi kepada masyarakat.
2. Tingkat 2 (Pematangan)
  - a. Membuat situs informasi publik yang interaktif,
  - b. Membuat situs tatap muka yang berhubungan dengan instansi lain.
3. Tingkat 3 (Pematapan)
  - a. Membuat situs transaksi pelayanan publik,
  - b. Membuat interoperabilitas aplikasi maupun dokumen dengan instansi lain
4. Tingkat 4 (Pemanfaatan)
  - a. Membuat situs atau aplikasi untuk pelayanan publik yang menghubungkan G2C, G2B, G2G dan G2E.

#### **Manfaat *E-government***

Dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Pengembangan *E-government* terdapat manfaat dalam pengembangan e-gov yaitu:

1. Efisiensi, cara yang dilakukan secara tepat untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memerhatikan waktu, biaya dan tenaga agar tepat guna tidak terbuang serta tugas yang dilaksanakan terlaksana dengan baik (Hasibuan, 2010).
2. Efektivitas, menurut Kurniawan (dalam Mahardita, 2017: 135) menjelaskan efektivitas ialah kemampuan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi tanpa adanya penekanan dan untuk mencapai sebuah tujuan.

3. Transparansi, Menurut Piotrowsky dan Van Rizin (2007) (dalam Dwiyanto, 2011: 241) transparansi pada pemerintahan dapat diartikan sebagai sikap keterbukaan mengenai informasi yang dibutuhkan masyarakat yang dapat disampaikan melalui pertemuan langsung, mempublikasikan informasi melalui website yang ada dan memberikan akses kepada publik untuk melihat suatu data dokumen.

#### **Elemen Sukses Pengembangan *E-government***

Harvard JFK School of Government (dalam Indrajit, 2006: 13-15) untuk mengimplementasikan konsep digitalisasi dalam kehidupan masyarakat terdapat 3 elemen yang harus diperhatikan dalam penerapannya, yakni:

1. *Support/ Pendukung*
  - a. Adanya kesepakatan bahwa *e-government* merupakan konsep penting dan harus diprioritaskan dalam mencapai visi dan misi.
  - b. Adanya atau dilakukannya sosialisasi mengenai *e-government*.
2. *Capacity/ Kemampuan*
  - a. Tersedianya dan sumber daya finansial yang mencukupi.
  - b. Tersedianya teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.
  - c. Tersedianya sumber daya manusia yang berkompeten dalam melakukan penyelenggaraan *e-government*.
3. *Value/ Manfaat*

Penerapan *e-government* dapat memberikan keuntungan atau manfaat kepada masyarakat sebagai penerima jasa.
4. *Local Culture/ Budaya Lokal*

Nugroho (2008:168) budaya lokal dilihat dari kesiapan dan kemampuan masyarakat

untuk menggunakan maupun menerima *e-government*.

## METHOD

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci dari hasil penelitian yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.

## RESULT AND DISCUSSION

### Bentuk E-government di Kantor Lurah Guntung

#### a. SIPUT (Sistem Pelayanan Umum Terpadu)

SIPUT merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi, penerapan SIPUT yang diterapkan di Kantor Lurah Guntung dimulai sejak tahun 2013 di mana mulai dilaksanakannya pengembangan teknologi informasi dalam bidang pelayanan yang diberikan oleh masyarakat sehingga pelayanan tidak dilakukan secara manual serta diterapkannya inovasi pelayanan pada malam hari disetiap hari Senin dan Selasa pukul 20.00-22.00 WITA, di Kantor Lurah Guntung telah terdapat 26 jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dengan penggunaan aplikasi SIPUT dari tahun 2013 sampai dengan 2022.

#### b. Bontang Prima

Bontang prima merupakan aplikasi presensi berbasis android untuk kepegawaian di Kota Bontang yang mana juga diterapkan untuk pegawai di Kantor Lurah Guntung sejak tahun 2020. Sistem pengisian e-absensi yang dilakukan secara pribadi dengan sistem online yang menggunakan android. Maka dari itu setiap pegawai di Kantor Lurah Guntung memiliki fasilitas pendukung untuk mengisi absensi yang dilakukan di setiap hari kerja.

Pengisian absensi pada pagi hari dimulai dari pukul 07.30 WITA sedangkan pada sore hari paling cepat ialah pukul 16.00 WITA. Selain berfungsi sebagai presensi, penerapan bontang prima juga dapat mengumpulkan data sasaran kinerja pegawai yang menjadi salah satu indikator dalam pemberian tunjangan atau gaji yakni dilihat dari indikator tingkat kehadiran pegawai.

#### c. E-kinerja

E-kinerja ialah suatu sistem yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan kinerja pegawai negeri sipil yang disebut juga e-SKP (Sasaran Kinerja Pegawai). Hadirnya aplikasi e-kinerja di Kantor Lurah Guntung ini pada dasarnya terkoneksi oleh pemerintah Kota Bontang, e-kinerja pegawai di Kota Bontang yang juga digunakan oleh pegawai yang berstatus ASN di Kantor Lurah Guntung sejak tahun 2020 bahwa untuk bisa mengakses e-kinerja setiap pegawai akan memasukan username dan password mereka sehingga pegawai di Kantor Lurah Guntung dapat melakukan pengisian e-kinerja.

#### d. E-arsip

E-arsip merupakan sistem yang disediakan oleh PPID Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang sebagai media penyimpanan serta penyebarluasan dokumen - dokumen pemerintahan yang dimiliki oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bontang, e-arsip berisi informasi-informasi pemerintah kota Bontang yang diizinkan untuk dipublikasikan kepada publik. Penerapan e-arsip di Kantor Lurah Guntung telah dilakukan sejak tahun 2020 yang mana dokumen informasi-informasi mengenai Kelurahan Guntung diupload di portal e-arsip setiap 6 bulan sekali dan dapat diakses melalui <https://e-arsip.bontangkota.go.id/>.

#### e. E-SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)

Di Kantor Lurah Guntung penerapan e-SIPD telah dilaksanakan dari tahun 2020. Sejak itu maka penyusunan perencanaan

pembangunan di Kelurahan Guntung diusulkan melalui e-SIPD. E-SIPD merupakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menyediakan data dan informasi pembangunan daerah, penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang pelaksanaannya oleh pemerintah daerah secara nasional, informasi yang terkait perencanaan pembangunan dan perencanaan keuangan di Kantor Lurah Guntung tersedia di e-SIPD yang pengisian usulannya maupun informasinya dilakukan langsung oleh staff yang bekerja di Kantor Lurah dan untuk informasi keuangan akan diawasi langsung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bontang sehingga penggunaan dana di Kantor Lurah Guntung dilaksanakan sesuai dengan rencana anggaran yang ditetapkan sebelumnya.

**f. SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation)**

SIKS-NG berisikan data terpadu kesejahteraan sosial yang merupakan program dari Kementerian Sosial yang memudahkan dalam memberikan bantuan kepada warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Kantor Lurah Guntung penerapan SIKS-NG telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Dengan adanya data warga miskin maka warga akan mendapatkan kartu tanda miskin (KTM) yang manfaatnya akan diberikan langsung kepada warga yaitu bantuan tunai maupun non-tunai dari pemerintah.

**g. Stimulan dan Asmara Bang Sige**

Stimulan dan Asmara bang sige. Ini merupakan inovasi dari Balitbang Kota Bontang yang digunakan hanya di daerah kota Bontang sejak tahun 2022. Aplikasi stimulan maupun asmara bang sige telah didukung oleh geospasial, yang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2011 ialah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu. Keterlibatan ketua RT dalam penerapan aplikasi stimulan dan

asmara bang sige sangat penting. Dengan sistem kerja ketua RT yang diberikan username dan password serta mewajibkan untuk mengisi data diri, setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi ketua RT dapat mengisi usulan pembangunan yang dibutuhkan di suatu RT, namun pengisian usulan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan karena jika tidak, aplikasi stimulan dan asmara bang sige akan otomatis tertutup dan tidak bisa diakses sehingga ketua RT tidak dapat memberikan usulan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan RT tersebut.

**Pemanfaatan E-government dalam Memudahkan Pekerjaan Pegawai di Kantor Lurah Guntung**

**a. Efisiensi**

Manfaat efisiensi dilihat dari pemanfaatan aplikasi stimulan di Kantor Lurah Guntung dapat membuat pegawai cepat dalam bekerja. Pemanfaatan e- government yang berbentuk SIPUT (Sistem Pelayanan Umum Terpadu) dalam bidang layanan tidak lagi dilakukan secara manual seperti pengisian formulir warga dan penginputan data secara manual. Aplikasi stimulan dan asmara bang sige yang diterapkan dapat menghemat dan memangkas waktu pegawai karena pegawai tidak perlu memantau ke lokasi usulan pembangunan secara langsung karena telah ada pencatatan waktu dan lokasi yang sesuai sehingga RT tidak bisa memanipulasi data walaupun pegawai tidak ke lapangan. Selanjutnya penerapan bontang prima yang menggunakan handphone android dapat memangkas waktu antri pengisian daftar hadir dan pulang pegawai dan dapat memudahkan pegawai mengisinya di mana saja tanpa harus mengantri, artinya pegawai dapat mengisi bontang prima hanya di lokasi Kantor Lurah Guntung,

**b. Efektivitas**

Efektivitas dilihat dari penerapan e- government yang berbentuk SIPUT dan e-

kinerja di Kantor Lurah Guntung menghasilkan pekerjaan yang efektif bagi pegawai. Aplikasi SIPUT memudahkan pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung dengan inovasi pelayanan malam yang diterapkan menghasilkan pemberian pelayanan secara prima ini bisa dilihat dari jumlah warga yang memperoleh pelayanan dalam setiap harinya berjumlah paling sedikit 5 orang dari tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian penerapan e-kinerja efektif dalam mencatat tugas dan pekerjaan pegawai yang nantinya memiliki pengaruh dengan gaji dan tunjangan yang didapatkan pegawai di setiap bulan.

### c. Transparansi

Indikator transparansi di Kantor Lurah Guntung dapat dilihat dengan adanya penerapan e-arsip dan e-SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dalam informasi keuangan. Ketersediaan dokumen informasi terkait Kelurahan Guntung di e-arsip menjadikan masyarakat luas dapat memperoleh informasi tersebut secara transparan apabila informasi yang dibutuhkan masyarakat bersifat publik sedangkan dengan pemanfaatan e-SIPD maka penggunaan anggaran keuangan di Kantor Lurah Guntung digunakan dengan transparan dan secara tanggung jawab di bawah pengawasan Badan Pengelolaan dan Keuangan Kota Bontang.

## Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pemanfaatan E-government di Kantor Lurah Guntung

### Faktor Pendorong

#### a. Support/ Pendukung

Dalam hal ini faktor support/ pendukung dilihat dari pemanfaatam SIPUT merupakan pemanfaatan e-government yang pertama kali diterapkan di Kantor Lurah Guntung maka pelaksanaan sosialisasi pada saat itu dilakukan oleh orang yang mengembangkan SIPUT kantor lurah dengan memberikan pengajaran kepada admin petugas front office yang saat itu berjumlah 2 orang yakni, Sabariyah dan Agustin

Dian Lestari. Dengan itu maka pemanfaatan SIPUT terus mengalami perkembangan yang terus disosialisasikan kepada pegawai yang bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dengan dukungan semua pegawai dalam melakukan sosialisasi sehingga penggunaan SIPUT di Kantor Lurah Guntung dapat dilaksanakan sampai dengan sekarang.

#### b. Capacity/ Kemampuan

Faktor pendorong pemanfaatan e-government yakni capacity/ kemampuan terdapat pada sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh pegawai di Kantor Lurah Guntung sebelum penerapan e-government Pemerintah Kota Bontang melalui Diskominfo melaksanakan bimbingan teknis yang diikuti oleh pegawai di Kantor Lurah Guntung, dan ada pembagian tugas yang memang dikerjakan oleh pegawai yang sesuai dengan tupoksinya serta tersedianya fasilitas pendukung seperti komputer, laptop, handphone berbasis android serta jaringan internet yang menjadi poin penting dalam pemanfaatan e-government pun cukup memadai.

#### c. Value/ Manfaat

Manfaat yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat ialah aplikasi SIPUT yang memudahkan proses pelayanan dan aplikasi SIKS-NG yang berisikan data warga miskin yang akan diberikan bantuan berupa non-tunai dengan berbentuk BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan program keluarga harapan (PKH) dengan pemberian kartu ATM kepada masyarakat miskin yang setiap bulannya diberikan bantuan tunai berupa dana untuk pendidikan, dana untuk rumah tangga ataupun dana untuk lansia.

#### d. Local Culture/ Budaya Lokal

Budaya lokal yang dimaksud disini adalah peranan masyarakat sebagai pendukung pelaksanaan e-government di Kantor Lurah Guntung. Hal itu dilihat dari kolaborasi antara pegawai di Kantor Lurah Guntung dengan masyarakat dalam penerapan SIKS-NG,

stimulan dan asmara bang sige yang melibatkan ketua RT. Budaya lokal masyarakat di Kelurahan Guntung dalam mendukung pemanfaatan e-government dilihat dari kesiapan masyarakat yang ikut serta dalam penggunaan e-government yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

## Faktor Penghambat

### a. Jaringan Internet

Faktor penghambat pemanfaatan e-government di Kantor Lurah Guntung ialah jaringan internet yang kerap kali mengalami masalah padahal jaringan internet merupakan faktor pendukung utama dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi sehingga proses pelayanan khususnya dalam penggunaan aplikasi SIPUT akan terganggu prosesnya.

### b. Tidak Adanya e-RT

Dalam hal pelayanan ternyata belum diterapkannya e-RT di Kantor Lurah Guntung sehingga proses pelayanannya cukup memakan waktu. Dengan tidak diterapkannya e-RT maka warga di Kelurahan Guntung masih harus secara manual datang langsung ke ketua RT untuk mendapatkan surat pengantar kemudian warga akan mendatangi kantor lurah untuk mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Maka dari itu dapat diketahui bahwa pelayanan yang diberikan belum dilaksanakan dengan optimal.

### c. Kurangnya Sosialisasi

Diketahui bahwa salah satu prosedur dalam pelayanan ialah surat pengantar dari RT dalam pelaksanaannya masih belum diketahui beberapa masyarakat sehingga masyarakat yang belum mengetahui harus bolak-balik untuk mengurus dokumen ini dikarenakan masyarakat tidak diberikan sosialisasi secara langsung.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, yakni:

1. Ada 7 bentuk *e-government* ialah SIPUT (Sistem Pelayanan Umum Terpadu) yang diterapkan sejak tahun 2013 yang memiliki fungsi pelayanan administrasi untuk masyarakat, kemudian adanya bontang prima dan e-kinerja yang diterapkan tahun 2020 mengenai absensi online dan kepegawaian, selanjutnya hadirnya e-arsip diterapkan tahun 2020 yang memuat data informasi kelurahan yang bersifat publik sehingga dapat dipublikasikan secara luas, selain itu terdapat e-SIPD diterapkan tahun 2020 terkait informasi pembangunan daerah serta informasi keuangan daerah, SIKS-NG diterapkan pada tahun 2020 memuat data warga miskin yang dikelola oleh Kementerian Sosial serta pada tahun 2022 terdapat aplikasi stimulan dan asmara bang sige yang memiliki fungsi sebagai wadah usulan pembangunan fisik dan non fisik di Kelurahan Guntung dengan penggunaan geospasial sebagai pendukung. Ketujuh bentuk *e-government* di Kantor Lurah Guntung tentunya memberikan manfaat.
2. Pemanfaatan *e-government* dapat memudahkan dalam pekerjaan pegawai dilihat dari efisiensi, efektivitas dan transparansi. Kehadiran SIPUT, bontang prima, stimulan dan asmara bang sige dapat membuat penggunaan waktu kerja yang efisien pada pegawai. Untuk keefektifitasan dilihat dari pelayanan prima yang diberikan dalam penggunaan SIPUT serta penerapan e-kinerja dalam mencatat pekerjaan pegawai. Kemudian transparansi yang dilakukan di Kantor Lurah Guntung dilihat dari penggunaan e-arsip yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas serta

dengan hadirnya e-SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) terkait informasi keuangan dalam penggunaan anggaran yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

3. Faktor pendorong yang memudahkan pemanfaatan e-government ini berasal dari support/dukungan mengenai e-government ialah pegawai memiliki pemahaman yang sama bahwa pelaksanaan pemanfaatan e-government merupakan hal yang penting dengan saling memberikan sosialisasi secara terus menerus, capacity/ kemampuan dilihat dari sumber daya manusia pegawai yang bekerja dan adanya fasilitas pendukung ialah berupa perangkat komputer atau laptop dan handphone android pegawai dalam pengisian e- absensi bontang prima, value/ manfaat yang diberikan kepada masyarakat dalam penerapan e-government ialah pemanfaatan SIPUT dan SIKS-NG dan local culture/budaya lokal masyarakat yang dilihat dari kemampuan masyarakat ikut serta dalam penerapan e-government dalam hal ini ialah keikutsertaan ketua RT dalam pemanfaatan stimulan dan asmara bang sige. Sedangkan, faktor penghambat berasal dari fasilitas yang kurang memadai ialah jaringan internet dan aplikasi lainnya. Tak terlepas dari itu masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada warga masyarakat sehingga masyarakat masih merasa pelayanan yang diberikan kurang optimal ini juga dikarenakan belum terealisasinya penggunaan e-RT.

Damanik, Marudur Pandapotan dan Erisva Hakiki Purwaningsih. (2017). *E- government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintahan (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)*. Jurnal Studi Komunikasi dan Media. Vol. 21, No. 2. Hlm.154-155.

Dwiyanto, Agus. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hasibuan, Melayu S.P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Toko Agung Gunung.

Helim, Abdul. (2009). *Fikih Good Governance*. Jurnal Studi Agama dan Masyarakat. Vol. 6, No. 1, Hlm.4.

Indrajit, Richardus Eko. (2006). *Electronic Government “Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi”*. Bandung: Aptikom.

Mahardita, Hayuning Rizki. (2017). *Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur*. e- Journal Ilmu Pemerintahan. Vol. 5, No. 1, hlm.135.

Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Poerwadarminto W.J.S. (2002). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.

Wijaya, Aditya. (2015). *Penerapan E-Government di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang (Inpres No.3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government)*. Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

#### Sumber Dokumen:

Undang-Undang Nomo 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

#### REFERENSI

##### Books:

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3  
Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi  
Nasional Pengembangan E- government.

Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 16 Tahun  
2017 tentang Penyelenggaraan E-  
government.